

**PENGARUH PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA DENGAN ALOKASI BELANJA MODAL SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
(STUDI PADA KABUPATEN/KOTA PROVINSI RIAU PERIODE 2011-2015)**

Mudrika Alamsyah Hasan & Muhammad Fajar Suryo Agung

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Riau

Email: bang_dika77@yahoo.com

ABSTRACT

This study aimed to examine the affect of local revenue, general allocation fund and special allocation fund fund to human development index with capital expenditure as intervening variable. The population of study is budget realization report of revenue and expenditure regional in Riau province from 2011-2015 and table of human development index from 2011-2015. The method of this study used purposive sampling and obtain each 50 data as a sample. The sample's criterias of this study are publishing budget realization report annually from 2011-2015 and having human development index data from 2011-2015. Methods of Analysis is conducted with path analysis using SPSS (Statistical Product and Service Solutions)Version 21. Test results that have been done. The partial regression test I (t test I) shows that Local Revenue affects the Capital Expenditure Allocation with $P < 0.05$ ($P = 000$). General Allocation Fund affect the Capital Expenditure Allocation with $P > 0,05$ ($P = ,021$). The Special Allocation Fund has no effect on Capital Expenditure Allocation with $P > 0.05$ ($P = ,380$). Partial regression test II (t test II) indicates that Local Revenue affects the Human Development Index with $P < 0.05$ ($P = 000$). General Allocation Fund has no effects on Human Development Index with $P < 0.05$ ($P = ,057$). The Special Allocation Fund has no effect on Human Development Index with $P > 0.05$ ($P = ,078$). Capital Expenditure did not affect the Human Development Index with $P > 0.05$ ($P = ,101$). The results of this study also indicate that Local Revenue does not indirectly affect the Human Development Index through the Capital Expenditure Allocation by beta coefficient standard $(,916) + (-,091504) = (,0824496)$. The General Allocation Fund does not indirectly affect the Human Development Index through the Capital Expenditure Allocation with the standard beta coefficients $(,158) + (,044992) = (,202992)$. The Special Allocation Fund indirectly affects the Human Development Index through the Capital Expenditure Allocation with the standard beta coefficients $(-,137) + (-,016568) = (-,153568)$. The coefficient of determination in this research is 75.7%. Four of these variables affect the dependent variable is 75.3%, while 24.7% is influenced by other variables that are not discussed in this study.

Keyword : local revenue, general allocation fund, special allocation fund, capital expenditure and human development index

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pendapatan daerah, dana alokasi umum dan dana alokasi khusus terhadap indeks pembangunan manusia dengan belanja modal sebagai variabel intervening. Populasi penelitian adalah laporan realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah di Provinsi Riau dari tahun 2011-2015 dan tabel indeks pembangunan manusia dari tahun 2011-2015. Metode penelitian ini menggunakan *purposive sampling* dan memperoleh masing-masing 50 data sebagai sampel. Kriteria sampel dari penelitian ini adalah menerbitkan laporan

realisasi anggaran setiap tahun dari 2011-2015 dan memiliki data indeks pembangunan manusia dari 2011-2015. Metode Analisis dilakukan dengan analisis jalur menggunakan SPSS Versi 21. Hasil uji yang telah dilakukan. Uji regresi parsial I (t test I) menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah mempengaruhi Alokasi Pengeluaran Modal dengan $P < 0,05$ ($P = 000$). Dana Alokasi Umum mempengaruhi Alokasi Belanja Modal dengan $P > 0,05$ ($P = ,021$). Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh pada Alokasi Pengeluaran Modal dengan $P > 0,05$ ($P = ,380$). Uji regresi parsial II (uji t II) menunjukkan bahwa Pendapatan Lokal mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dengan $P < 0,05$ ($P = 000$). Dana Alokasi Umum tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan $P < 0,05$ ($P = ,057$). Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia dengan $P > 0,05$ ($P = ,078$). Pengeluaran Modal tidak mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia dengan $P > 0,05$ ($P = ,101$). Hasil penelitian ini juga menunjukkan bahwa Pendapatan Asli Daerah secara tidak langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Alokasi Belanja Modal dengan standar koefisien beta $(,916) + (-,091504) = (,0824496)$. Dana Alokasi Umum tidak secara tidak langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Alokasi Belanja Modal dengan koefisien beta standar $(,158) + (,044992) = (,202992)$. Dana Alokasi Khusus secara tidak langsung mempengaruhi Indeks Pembangunan Manusia melalui Alokasi Pengeluaran Modal dengan koefisien beta standar $(-,137) + (-,016568) = (-,153568)$. Koefisien determinasi dalam penelitian ini adalah 75,7%. Empat variabel ini mempengaruhi variabel dependen yaitu 75,3%, sedangkan 24,7% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dibahas dalam penelitian ini.

Kata kunci: Pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, belanja modal dan indeks pembangunan manusia

PENDAHULUAN

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan alat ukur yang digunakan untuk mengetahui kualitas pembangunan manusia.

Membahas tentang pemerataan pembangunan, hal ini sangat berkaitan erat dengan tema desentralisasi fiskal yang mensyaratkan bahwa pemerintah pusat berkewajiban untuk menjamin sumber keuangan atas pendelegasian tugas dan wewenang dari pusat ke daerah.

Adiputra dkk (2015) menyatakan bahwa berdasarkan asas desentralisasi, pembiayaan penyelenggaraan pembangunan pemerintah daerah dilakukan atas beban APBD. Pengeluaran pembiayaan untuk penyelenggaraan ini digunakan untuk belanja operasi, belanja modal dan belanja tak terduga. Pengalokasian belanja pada masing-masing jenis belanja diprioritaskan untuk meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat melalui peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak.

Sumber-sumber keuangan utama daerah yang digunakan untuk membiayai belanja daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada kenyataannya PAD antara satu daerah dan daerah lainnya memiliki perbedaan jumlah yang cukup signifikan. Sehingga melalui Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah terdapat sumber lainnya yang dapat digunakan dalam pembangunan daerah yaitu dana perimbangan yang terdiri dari Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH), serta lain-lain pendapatan yang sah.

Mengenai IPM pada daerah provinsi Riau, terdapat suatu permasalahan yang dikutip dari Bertuahpos.com (2016) bahwa Pelaksana Tugas Gubernur Riau yaitu H.

Arsyadjuliandi Rachman menyatakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di provinsi Riau masih butuh banyak perbaikan. Menurutnya, ada 7 daerah di Riau yang IPM-nya masih rendah. Rata-rata IPM di daerah tersebut berada di bawah 70 persen. Sementara IPM rata-rata Nasional di atas 70 persen. Sehingga beliau menyarankan kinerja pemerintah untuk mengupayakan peningkatan IPM harus lebih selektif dan masif.

Terdapat beberapa hasil penelitian yang telah menguji hubungan PAD, DAU dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia. Beberapa diantaranya yaitu penelitian yang dilakukan Adiputra dkk (2015) menyatakan PAD berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan PAD, DAU dan DAK berpengaruh tidak langsung terhadap Indeks Pembangunan Manusia melalui alokasi belanja modal, Darmayanti (2014) menyatakan DAU berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia, Williantara dan Budiasih (2016) menyatakan DAK berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia,

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1) Apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap IPM? 2) Apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal? 3) Apakah PAD, DAU dan DAK berpengaruh secara tidak langsung terhadap IPM melalui Alokasi Belanja Modal?

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah 1) Untuk menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap IPM 2) Untuk menguji pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal 3) Untuk menguji pengaruh tidak langsung PAD, DAU dan DAK terhadap IPM melalui Alokasi Belanja Modal.

TINJAUAN TEORITIS

Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) disebut juga dengan Human Development Index (HDI). Christy dan Adi (2009) menyatakan IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.

Hubungan PAD terhadap IPM

Dalam konteks ini, PAD sebagai pengukur pendapatan sendiri daerah sangat diharapkan sebagai sumber pembiayaan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Sehingga jika suatu daerah semakin mandiri berarti pendapatan asli daerah tersebut akan semakin mampu membiayai pembangunan daerahnya sendiri.
H1: PAD berpengaruh langsung terhadap IPM

Hubungan PAD terhadap Alokasi Belanja Modal

Besar kecilnya belanja modal akan ditentukan dari besar kecilnya PAD. Sehingga jika Pemda ingin meningkatkan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat dengan jalan meningkatkan belanja modal, maka Pemda harus berusaha keras untuk menggali PAD yang sebesar-besarnya.

H2: PAD berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal

Hubungan Belanja Modal terhadap IPM

Belanja modal yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam pengadaan

aset daerah sebagai investasi, pada akhirnya mampu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat karena adanya peningkatan sarana dan prasarana publik sehingga menunjang peningkatan pelayanan pada sektor publik. Sehingga belanja modal memiliki peran yang penting terhadap peningkatan indeks pembangunan manusia.

H3: Belanja modal berpengaruh langsung terhadap IPM

Hubungan PAD terhadap IPM melalui Alokasi Belanja Modal

Pendapatan Asli Daerah diharapkan dapat menjadi sumber pembiayaan terhadap peningkatan pelayanan masyarakat. Setyowati dan Suparwati (2012) menyatakan Pendapatan Asli Daerah setidaknya dapat digunakan untuk pembangunan jalan raya yang bersumber pajak kendaraan bermotor dan pajak bahan bakar, disamping itu pembangunan fasilitas kesehatan dapat bersumber retribusi pelayanan kesehatan yang diberikan oleh pemda. Jadi dalam hal ini dimensi umur panjang dan sehat dalam Indeks Pembangunan Manusia dapat tercapai dengan pembangunan fasilitas kesehatan.

H4: PAD berpengaruh tidak langsung terhadap IPM melalui Alokasi belanja modal

Hubungan DAU terhadap IPM

Pemerintah daerah dalam pelaksanaannya seharusnya mengalokasikan dana ini untuk belanja langsung, yakni belanja yang memberikan pelayanan lebih baik kepada masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sebagaimana tuntutan dari otonomi daerah (Irwanti, 2014). Oleh itu, alokasi DAU yang tinggi bagi suatu daerah bukan indikator kekayaan, melainkan pengalokasian dana yang tinggi tersebut berhubungan dengan belanja langsung yang berpengaruh pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

H5: DAU berpengaruh langsung terhadap IPM.

Hubungan DAU terhadap alokasi belanja modal

Berkaitan dengan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah, hal tersebut merupakan konsekuensi adanya penyerahan kewenangan pemerintah pusat kepada pemerintah daerah. Dengan demikian terjadi transfer yang cukup signifikan dalam APBN dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah, dan pemerintah daerah secara leluasa dapat menggunakan dana tersebut apakah untuk memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat atau untuk keperluan lain yang tidak penting (Oktriniatmaja, 2011).

H6: DAU berpengaruh langsung terhadap Alokasi Belanja Modal

Hubungan DAU terhadap IPM melalui alokasi belanja modal Dana Alokasi Umum (DAU) diberikan oleh pemerintah pusat untuk mengurangi kesenjangan fiskal antar daerah sehingga terjadi pembangunan yang merata di setiap daerah. Oleh sebab itu, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola dana ini dengan baik dan mengalokasikan untuk membiayai pengeluaran daerah yang berorientasi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan dan perbaikan pelayanan kepada masyarakat yang dialokasikan pada belanja modal (Adiputra dkk, 2015).

H7: DAU berpengaruh tidak langsung terhadap IPM melalui alokasi belanja modal

Hubungan DAK terhadap IPM

Dalam kaitannya dengan perimbangan antara pusat dan daerah, fungsi DAK sebenarnya hanya sebagai penambah atau pelengkap jenis dana lainnya. Namun dalam perkembangannya, keberadaan DAK menjadi semakin penting bagi

pembangunan daerah. Hal ini disebabkan oleh komponen utama dana perimbangan dalam bentuk DAU yang pada umumnya hanya mencukupi untuk memenuhi kebutuhan belanja birokrasi.

H8: DAK berpengaruh langsung terhadap IPM

Hubungan DAK terhadap Alokasi Belanja Modal

DAK merupakan dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada pemerintah daerah untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan prioritas nasional. Tujuan DAK untuk mengurangi beban biaya kegiatan khusus yang harus ditanggung oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan DAK diarahkan kepada kegiatan investasi pembangunan, pengadaan, peningkatan, perbaikan sarana dan prasarana fisik pelayanan publik dengan umur ekonomis panjang (Wandira, 2013).

H9: DAK berpengaruh langsung terhadap alokasi belanja modal

Hubungan DAK terhadap IPM melalui alokasi belanja modal

DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Menurut Abdullah dan Halim (2004) dalam Putra dan Ulupui (2015) aset tetap yang dimiliki dari penggunaan belanja modal merupakan prasyarat utama dalam memberikan pelayanan publik oleh pemda.

H10: DAK berpengaruh tidak langsung terhadap IPM melalui alokasi belanja modal

METODE PENELITIAN

Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh Laporan Realisasi APBD Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau periode 2011-2015 dan tabel IPM Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau periode 2011-2015. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling*, yaitu pemilihan sampel dengan kriteria.

Definisi Operasional Variabel dan Pengukuran Variabel

Indeks Pembangunan Manusia

IPM adalah indeks komposit untuk mengukur pencapaian kualitas pembangunan manusia untuk dapat hidup secara lebih berkualitas, baik dari aspek kesehatan, pendidikan, maupun aspek ekonomi.

$$IPM = Indeks (AHH + P + PPP)$$

IPM : Indeks Pembangunan Manusia
AHH : Angka Harapan Hidup (Kesehatan)
P : Pendidikan
PPP : Paritas Daya Beli

Pendapatan Asli Daerah

PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

$$PAD = HPD + RD + PLPD + PLS$$

PAD : Pendapatan asli daerah

HPD : Hasil pajak daerah
 RD : Retribusi daerah
 PLPD : Pendapatan laba perusahaan daerah
 PLS : Lain-lain pendapatan yang sah

Dana Alokasi Umum

Dana Alokasi Umum adalah dana yang berasal dari APBN dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi.

$$DAU = \text{Celah Fiskal} + \text{Alokasi Dasar}$$

Dana Alokasi Khusus

DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional.

$$DAK = \text{Bobot Daerah} + \text{Bobot Teknis}$$

Alokasi Belanja Modal

Belanja modal adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembentukan modal yang sifatnya menambah aset tetap/ inventaris

$$BM = BT + BPM + BGB + BJIJ + BATL$$

BM : Belanja Modal
 BT : Belanja Tanah
 BPM : Belanja Gedung Bangunan
 BJIJ : Belanja Jalan Irigasi dan Jaringan
 BATL : Belanja Aset Tetap Lainnya

Metode Analisis Data

Pengujian hipotesis dilakukan dengan analisis jalur (*Path Analysis*). Model penelitian ini dituangkan dalam persamaan linear sebagai berikut:

Model persamaan regresi I

$$\text{LnABM} = \alpha + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnDAU} + \beta_3 \text{LnDAK} + e_1$$

Model Persamaan regresi II

$$\text{IPM} = \alpha + \beta_1 \text{LnPAD} + \beta_2 \text{LnDAU} + \beta_3 \text{LnDAK} + \beta_4 \text{LnABM} + e_2$$

Keterangan:

IPM : Indeks Pembangunan Manusia
 LnABM : Alokasi Belanja Modal
 LnPAD : Pendapatan Asli Daerah
 LnDAU : Dana Alokasi Umum
 LnDAK : Dana Alokasi Khusus
 α : Konstanta
 β_1 - β_5 : Koefisien regresi
 e : Error

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Kabupaten/Kota yang ada di provinsi Riau terdiri dari 12 Kabupaten/Kota. Berdasarkan seleksi sampel dengan kriteria tertentu hanya 10 Kabupaten/Kota yang memenuhi kriteria dari tahun 2011-2015. Sehingga total sampel dalam penelitian ini berjumlah 50.

Hasil Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif memberikan gambaran suatu data yang dilihat dari nilai maksimum, minimum, rata-rata (mean) dan standar deviasi. Hasil statistik deskriptif penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 1
Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
IPM	50	60.38	79.32	67.8902	4.46127
PAD	50	25116050607.00	492511317377.00	131492761116.5200	117879141228.68097
DAU	50	30912561000.00	847860750000.00	493059147470.0000	188769911666.74610
DAK	50	1541560000.00	141928665000.00	31709848550.0000	28492286228.98024
BM	50	131220032630.21	1126673688700.00	434995248912.6321	233814575546.42944
Valid N (listwise)	50				

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Hasil Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk mengetahui apakah dalam model regresi, variabel pengganggu atau residual memiliki distribusi normal.

Tabel 2
Hasil Uji Normalitas Data
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

Unstandardized Residual		
N		50
Normal Parameters ^{a b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	2.10841757
Most Extreme Differences	Absolute	.095
	Positive	.092
	Negative	-.095
Kolmogorov-Smirnov Z		.672
Asymp. Sig. (2-tailed)		.757

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan hasil tabel diatas diketahui bahwa nilai signifikan Kolmogorov-Smirnov Z dari keseluruhan variabel lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa seluruh variabel terdistribusi normal.

Hasil Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi untuk penelitian ini menggunakan *Run test*. Hasil pengolahan data adalah sebagai berikut:

Tabel 3
Hasil Uji Autokorelasi
Runs Test

Unstandardized Residual	
Test Value ^a	6.09761
Cases < Test Value	25
Cases >= Test Value	25
Total Cases	50
Number of Runs	20
Z	-1.715
Asymp. Sig. (2-tailed)	.086

a. Median

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan data diatas diketahui bahwa nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar 0,086 lebih besar dari 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala atau masalah autokorelasi.

Hasil Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Berikut tabel uji multikolinearitas.

Tabel 4
Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta	t		Tolerance	VIF
1 (Constant)	63.432	1.178		53.853	.000		
PAD	3.468E-11	.000	.916	10.226	.000	.618	1.618
DAU	3.728E-12	.000	.158	1.955	.057	.762	1.312
DAK	-2.152E-11	.000	-.137	-1.806	.078	.857	1.167
BM	-2.893E-12	.000	-.152	-1.675	.101	.606	1.651

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel 5 diatas, hasil perhitungan menunjukkan bahwa tidak ada multikolinearitas antar variabel independen dalam model regresi dimana nilai *tolerance* > 0,1 dan nilai VIF < 10.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dengan menggunakan uji Glejser dilakukan dengan meregresikan variabel-variabel bebas terhadap nilai absolut residualnya.

Tabel 5
Hasil Uji Heteroskedastisitas
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	2.417	.638		3.789	.000
PAD	2.509E-12	.000	.244	1.366	.179
DAU	-1.509E-12	.000	-.235	-1.461	.151
DAK	1.205E-11	.000	.283	1.868	.068
BM	-1.558E-12	.000	-.300	-1.666	.103

a. Dependent Variable: RES2

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel 5 diketahui bahwa nilai signifikan dari masing-masing variabel lebih besar dari 0.05. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat heteroskedastisitas dalam penelitian ini

Uji Analisis Jalur

Hasil uji analisis regresi berganda dapat dilihat pada table 6 berikut: Analisis jalur merupakan perluasan dari analisis regresi linear berganda. Analisis jalur adalah penggunaan analisis regresi untuk menaksirkan hubungan kausalitas antar variabel yang telah ditetapkan sebelumnya berdasarkan teori.

Tabel 6
Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda I
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	4.303E11	7.799E10		5.518	.000
PAD	1.195	.230	.602	5.201	.000
DAU	-.367	.154	-.296	-2.387	.021
DAK	.893	1.009	.109	.886	.380

a. Dependent Variable: BM

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y (\text{Belanja Modal}) = 4,303E11 + 1,195X_1 + (-0,367X_2) + 0,893X_3$$

Tabel 7
Hasil Persamaan Regresi Linear Berganda II
Coefficients^a

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1(Constant)	63.432	1.178		53.853	.000
PAD	3.468E-11	.000	.916	10.226	.000
DAU	3.728E-12	.000	.158	1.955	.057
DAK	-2.152E-11	.000	-.137	-1.806	.078
BM	-2.893E-12	.000	-.152	-1.675	.101

a. Dependent Variable: IPM

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel diatas maka dapat dibuat persamaan regresi linear berganda sebagai berikut:

$$Y \text{ (IPM)} = 63,432 + 3,468\text{E-}11X_1 + 3,728\text{E-}12X_2 + (-2,152\text{E-}11X_3) + (-2,893\text{E-}12X_4$$

Hasil Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi menunjukkan seberapa besar korelasi seluruh variabel independen terhadap variabel dependen. Berikut tabel uji koefisien determinasi:

Tabel 8
Uji Koefisien Determinasi
Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.881 ^a	.777	.757	2.20013

a. Predictors: (Constant), BM, DAK, DAU, PAD

Sumber: Data hasil olahan SPSS 21

Berdasarkan tabel 8 diatas, nilai *Adjusted R Square* atau koefisien determinasi adalah sebesar 0.757. Hal ini berarti sumbangan pengaruh variabel PAD, DAU, DAK dan Alokasi Belanja Modal terhadap variabel IPM adalah sebesar 75,7%. Sedangkan sisanya sebesar 24,3% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model ini, seperti SiLPA, pertumbuhan ekonomi, kemiskinan, ukuran pemerintah daerah (jumlah penduduk), inflasi dan lain sebagainya.

Hasil Pengujian Hipotesis dan Pembahasannya

Berdasarkan hasil dari tabel 7 dan 8 maka dapat disimpulkan hasil pengujian hipotesis dan pembahasannya pada masing-masing variabel adalah sebagai berikut:

Pengaruh PAD terhadap IPM

Hasil pengujian hipotesis pertama (H_1) menunjukkan bahwa PAD mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis pertama diterima.

Kesimpulan ini sesuai dengan pernyataan Pamudi (2008) dalam Sari dan Supadmi (2016) bahwa Tujuan utama pembangunan daerah selain kemandirian fiskal adalah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik melalui pembangunan manusia yang diukur dengan IPM.

Pengaruh PAD terhadap alokasi belanja modal

Hasil pengujian hipotesis kedua (H_2) menunjukkan bahwa variabel PAD mempunyai nilai signifikan sebesar 0,000. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,000 < 0,05$. Sehingga hipotesis kedua diterima.

Hasil tersebut sesuai dengan pernyataan Solikin (2007) mengenai PP No. 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menyebutkan bahwa APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah dan kemampuan pendapatan daerah. Artinya, disetiap penyusunan APBD, jika Pemda akan mengalokasikan belanja modal maka harus disesuaikan dengan kebutuhan daerah dengan mempertimbangkan PAD yang diterima. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Sari dan Supadmi (2016).

Pengaruh Belanja Modal terhadap IPM

Hasil pengujian hipotesis ketiga (H_3) menunjukkan bahwa variabel Alokasi Belanja Modal mempunyai nilai signifikan sebesar 0,101. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,101 > 0,05$. Maka hipotesis ketiga ditolak.

Hasil uji hipotesis pengaruh Alokasi Belanja Modal terhadap IPM dapat disimpulkan bahwa peningkatan infrastruktur publik dan penanaman modal pemerintah belum berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Wahyu dan Dwirandra (2015).

Pengaruh PAD terhadap IPM melalui Alokasi Belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis keempat (H_4) menunjukkan bahwa pengaruh langsung yang diberikan PAD terhadap IPM sebesar 0,916. Sedangkan pengaruh tidak langsung PAD melalui Belanja Modal terhadap IPM adalah (-0,091504) yang berarti bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung PAD melalui Alokasi Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM.

Daerah lebih berhemat dalam membelanjakan pendapatan yang merupakan hasil effort-nya sendiri dibandingkan dengan pendapatan yang diberikan pihak lain (transfer pemerintah pusat).

Pengaruh DAU terhadap IPM

Hasil pengujian hipotesis kelima (H_5) menunjukkan bahwa profitabilitas berpengaruh negatif variabel DAU mempunyai nilai signifikan sebesar 0,049. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,057 > 0,05$. Sehingga hipotesis kelima ditolak.

Pada dasarnya DAU lebih banyak digunakan untuk belanja umum pegawai bukan untuk infrastruktur dan fasilitas umum sehingga pengaruh terhadap IPM relatif kecil.

Pengaruh DAU terhadap alokasi belanja modal

Hasil pengujian hipotesis keenam (H_6) menunjukkan bahwa variabel DAU mempunyai nilai signifikan sebesar 0,021. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,021 < 0,05$. Sehingga hipotesis keenam diterima.

DAU sering disebut bantuan tak bersyarat (unconditional grants) karena merupakan jenis transfer antar tingkat pemerintah yang tidak terikat dengan

program pengeluaran tertentu. Berdasarkan pernyataan tersebut dan hasil hipotesis keenam, dapat disimpulkan terdapat kemungkinan bahwa DAU digunakan untuk belanja modal. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Darmayanti (2014) dan Novarianti (2016)

Pengaruh DAU terhadap IPM melalui alokasi belanja modal

Hasil pengujian hipotesis ketujuh (H_7) menunjukkan bahwa pengaruh langsung yang diberikan DAU terhadap IPM sebesar 0,158. Sedangkan pengaruh tidak langsung DAU melalui Belanja Modal terhadap IPM adalah 0,044992. Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih besar dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung DAU melalui Alokasi Belanja Modal tidak mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM.

Hal ini dapat disimpulkan bahwa jika dana yang dialokasikan melalui belanja modal yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, terdapat kemungkinan bahwa penggunaannya tidak cukup efektif dan akurat. Hasil penelitian ini mendukung Adiputra, dkk (2015).

Pengaruh DAK terhadap IPM

Hasil pengujian hipotesis kedelapan (H_8) menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai nilai signifikan sebesar 0,078. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,078 > 0,05$. Sehingga hipotesis kedelapan ditolak. Jadi dapat disimpulkan bahwa variabel Dana Alokasi Khusus tidak memiliki pengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

Berdasarkan penelitian Harahap (2011), tidak adanya hubungan antara DAK terhadap IPM disebabkan suatu penelitian tidak memisahkan alokasi DAK perbidang seperti pendidikan, kesehatan, jalan, irigasi, air bersih, kelautan dan perikanan serta pertanian. Selain itu, pengalokasian DAK per bidang di tiap-tiap daerah berbeda-beda tergantung dari prioritas pembangunan nasional yang telah ditentukan oleh pemerintah pusat bersama pemda. Selain itu juga disebabkan adanya perbedaan DAK untuk masing-masing kabupaten/kota. Hasil penelitian ini mendukung Harahap (2011) dan Darmayanti (2014).

Pengaruh DAK terhadap Alokasi belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis kesembilan (H_9) menunjukkan bahwa variabel DAK mempunyai nilai signifikan sebesar 0,380. Hasil tersebut menunjukkan bahwa $0,380 > 0,05$. Sehingga hipotesis kesembilan ditolak.

Menurut Aqnisa (2016) penyebab Dana Alokasi Khusus tidak berpengaruh terhadap Alokasi Belanja Modal adalah DAK secara absolut nilainya relatif kecil dan hanya digunakan untuk mendanai kegiatan khusus yang merupakan bagian dari program yang menjadi prioritas dan menjadi urusan daerah. Hasil penelitian ini mendukung Febriana dan Praptoyo (2015) serta Aqnisa (2016).

Pengaruh DAK terhadap IPM melalui Alokasi belanja Modal

Hasil pengujian hipotesis kesepuluh (H_{10}) menunjukkan bahwa pengaruh langsung yang diberikan DAK terhadap IPM sebesar (-0,137). Sedangkan pengaruh tidak langsung DAK melalui Belanja Modal terhadap IPM adalah (-0,016568). Berdasarkan perhitungan diatas diketahui bahwa nilai pengaruh langsung lebih kecil dibandingkan dengan nilai pengaruh tidak langsung. Hasil ini menunjukkan bahwa secara tidak langsung DAK melalui Alokasi Belanja Modal mempunyai pengaruh signifikan terhadap IPM.

DAK digunakan untuk meningkatkan pelayanan public. DAK ini bisa disamakan dengan belanja pembangunan karena digunakan untuk mendanai peningkatan kualitas pelayanan publik berupa pembangunan sarana dan prasarana publik. DAK digunakan sepenuhnya sebagai belanja modal oleh pemerintah daerah. Belanja modal kemudian digunakan untuk menyediakan aset tetap. Hasil penelitian ini mendukung penelitian Setyowati dan Suparwati (2012).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa PAD dan IPM berpengaruh terhadap IPM dan Alokasi Belanja Modal secara parsial. Untuk pengaruh tidak langsung yang berpengaruh terhadap IPM melalui alokasi belanja modal adalah variabel DAK.

Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebaiknya penelitian selanjutnya menggunakan sampel pada daerah lain dan dapat juga menambah variabel lainnya yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia agar mendapatkan hasil yang lebih representatif.

DAFTAR PUSTAKA

- Adiputra, I Made Wardana dkk. 2015. *"Pengaruh PAD, Dana Perimbangan dan SiLPA terhadap Kualitas Pembangunan Manusia dengan Alokasi Belanja Modal sebagai Variabel Intervening"*. Simposium Nasional Akuntansi 18 Universitas Sumatera Utara, Medan 16-19 September 2015.
- Aqnisa, Reuty Fajar. 2016. *"Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Pengalokasian Belanja Modal"*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Christy, Fhino Andrea dan Priyo Hari Adi. 2009. *"Hubungan antara DAU, Belanja Modal dan Kualitas Pembangunan Manusia"*. The 3rd National Conference UKWMS Surabaya.
- Darmayanti, Meutia Irma. 2014. *"Pengaruh PAD, DBH, DAU, dan DAK terhadap Indeks Pembangunan Manusia"*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Febriana, Imas Sherli dan Sugeng Praptoyo. 2015. *"Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Belanja Modal pada Provinsi Jawa Timur"*. Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi Vol. 4 No 9.
- Harahap, Riva Ubar. 2011. *"Pengaruh DAU, DAK dan DBH terhadap IPM pada Kab./Kota Propinsi Sumatera Utara"*. Jurnal Riset Akuntansi dan Bisnis.
- Irwanti, Eva. 2014. *"Analisis Pengaruh Dana Perimbangan terhadap IPM Kabupaten/Kota di Provinsi Papua Barat Periode 2008-2012"*. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Hassanudin Makassar.

- Oktriniatmaja, Rini. 2011. *"Pengaruh PAD, DAU dan DAK terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal"*. Tesis Program Studi Magister Manajemen Program Pasca Sarjana
- Sari, Ida Ayu Candra Yunita dan Supadmi, Ni Luh. 2016. *"Pengaruh PAD dan Belanja Modal pada Peningkatan IPM"*. E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana.
- Sarkoro, Hastu dan Zulfikar. 2016. *"Pengaruh Belanja Daerah, DAU, DAK dan PAD Terhadap IPM"*. Jurnal Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Setyowati, Lilis dan Yohana Kus Suparwati. 2012. *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, DAU, DAK, PAD terhadap IPM dengan Pengalokasian Belanja Modal Sebagai Variabel Intervening"*. Jurnal. Vol. 9 No.1.
- Siswadi dkk. 2015. *"Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, PAD dan Dana Perimbangan terhadap IPM melalui Belanja Modal"*. Jurnal Universitas Mataram Vol.5.2.
- Wahyu, I Putu Adita dan A.A.N.B. Dwirandra. 2015. *"Kemampuan Belanja Modal Memoderasi Pengaruh PAD, DAU, DAK dan SILPA pada IPM"*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana 12.3.
- Wandira, Arbie Gugus. 2013. *"Pengaruh PAD, DAU, DAK, Dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal"*. Jurnal Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Semarang.
- Williantara Gede Ferdi dan I Gusti Ayu Nyoman Budiasih. 2016. *"Pengaruh PAD, DAU, DAK, dan DBH pada IPM"*. Jurnal Akuntansi Universitas Udayana Vol. 16.3.

<http://bertuahpos.com.html>